

JEJAK-JEJAK POLITIS DALAM KITAB SUCI DAN DASAR BIBLIS BAGI KETERLIBATAN GEREJA DALAM POLITIK

Oleh: Yohanes Donbosko Bhodo

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menemukan kembali jejak-jejak politik di dalam Kitab Suci. Konkretnya tulisan ini hendak menjawab pertanyaan dimanakah posisi Gereja dalam dan apa perannya dalam politik demokrasi. Tulisan ini merupakan refleksi biblis yang berusaha untuk menemukan bahwa keterlibatan gereja di dalam politik mempunyai dasarnya dalam Kitab Suci. Hasilnya bahwa keterlibatan Gereja dalam politik adalah sebuah kewajiban dan bukan sekedar sebuah pilihan. Penulis menemukan bahwa keterlibatan Gereja dalam politik memiliki jejak di dalam Kitab Suci. Pesannya menjadi amat jelas bahwa Keterlibatan Gereja dalam politik adalah pilihan dasar atau (optio fundamentalis).

Kata Kunci: Kitab Suci, Politik, Gereja.

Pengantar

Tahun 2018-2019 disebut-sebut sebagai „tahun politik“ - tahun pesta demokrasi di Indonesia. Alasan mendasar munculnya term tersebut adalah karena adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah: 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten serta akan diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislatif (DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD) di seluruh Indonesia pada hari Rabu, 17 April 2019. Berhadapan dengan pagelaran demokrasi yang luar biasa besarnya itu, dapat saja muncul pertanyaan di manakah posisi Gereja dan bagaimana perannya?

Memperbincangkan posisi dan peran Gereja dalam politik berarti berbicara tentang panggilan Gereja untuk terlibat dalam bidang politik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis berupaya mencari jejak-jejak politis dalam Kitab Suci yang dapat dijadikan sebagai dasar pijak sekaligus penuntun arah bagi Gereja dalam bidang politik.

1. Gereja dan Panggilan Untuk Berpolitik

Gereja dan politik merupakan dua bidang yang berbeda. Kendatipun demikian, keduanya tetap berurusan dengan manusia dan kehidupannya; melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. Pelaksanaan karya panggilan itu akan menjadi semakin efektif karena berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan orang banyak (*bonum publicum*). Oleh karena itu, keduanya tidak pernah boleh dipisahkan.¹

Mark Twain pernah berujar: “Setiap orang tahu politik, tetapi tidak semua orang memahaminya”.² Ungkapan ini sebenarnya mau menunjukkan, bahwa term politik

¹ Edy Purwanto, *Kaum Awam dan Dasar-Dasar Panggilan Untuk Merasul* (Seri Pembelajaran Politik Umat) (Jakarta: Komisi Kerasulan Awam KWI, 2013), hlm. 24.

² Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 1.

memiliki bidang cakupan yang sangat luas, sehingga cukup rumit bagi seseorang untuk menemukan makna yang tepat tentangnya. Dalam hidup harian misalnya selalu saja ditemukan aneka ragam pemahaman tentang politik sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pakar politik ataupun masyarakat biasa seturut persepsinya masing-masing.

Secara etimologis, term „politik“ berasal dari kata Yunani: „*ta politika*“ yang berarti segala sesuatu yang menyangkut umum atau publik. Istilah ini berhubungan dengan kata „*polis*“ yang berarti kota; „*politeia*“ yaitu: nama buku hasil karya Plato yang berbicara tentang negara; „*politikon*“ yaitu: karya murid Plato bernama Aristoteles tentang soal-soal kenegaraan. Kedua filsuf Yunani Kuno ini berpendapat bahwa “politik itu terlalu penting sehingga diserahkan hanya kepada politikus saja“, demikian kata Plato; sedangkan Aristoteles mengembangkan definisi „*polis*“ sebagai masyarakat merdeka dengan hak yang sama dalam menata hidup bersama.³

Dalam pemakaian sehari-hari khususnya pada zaman Yunani klasik, kata ini sering disandingkan dengan kata „*techne*“ yang berarti seni atau teknik. Karena itu, arti dasar „politik“ adalah seni atau teknik untuk menyelenggarakan atau menata hidup bersama⁴. Selain itu, istilah politik juga dapat dipandang dalam konteks terjemahan kata Inggris „*policy*“ yang berarti kebijaksanaan. Sebagai suatu kebijaksanaan, tujuan politik yang sebenarnya adalah kesejahteraan umum, bukan kelompok atau golongan tertentu. Konsekuensinya, politik harus tunduk dan taat pada hukum moral dan dinilai menurut cita-cita tertentu.⁵ Dengan demikian, politik dipahami sebagai seni atau kearifan dan keterampilan untuk menata suatu kehidupan bersama dalam kemerdekaan dan persamaan sambil berpedoman pada peri kemanusiaan.

Jika politik dimengerti sebagai usaha bersama untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, maka urusan politik tidak dapat diserahkan hanya kepada sekelompok orang, tetapi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Gereja. Artinya, Gereja terpanggil untuk terlibat dalam tata dunia sebab politik bukanlah hal yang tabu bagi Gereja; politik bukan sesuatu yang kotor. Gereja tidak dapat bersikap diam atau menonton saja, tetapi harus terlibat. Gereja harus berani masuk dan berkecimpung dalam tata dunia politik, sebab Gereja ada dalam dunia dan berurusan dengan manusia yang hidup di tengah dunia.

1.1. Dasar Keterlibatan Gereja

Pembicaraan tentang dasar keterlibatan Gereja dalam tata dunia politik, tidak terlepas dari sejumlah pendasaran baik dari esensi politik itu sendiri, maupun dari sudut pandang Kitab Suci serta ajaran Magisterium Gereja. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan perhatian pada esensi politik serta pandangan Kitab Suci terkait bidang hidup politik.

Pertama-tama harus digarisbawahi bahwa politik merupakan sesuatu yang luhur, mulia dan eksistensial. Politik adalah usaha luhur yang berkaitan erat dengan hakikat dasar manusia. Antara manusia dan politik terdapat relasi yang sangat erat atau dapat dikatakan sebagai relasi *resiprok-komplementer*, saling melengkapi satu sama lain. Politik adalah hak dasariah manusia; setiap pribadi memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam bidang politik. Politik ada karena manusia dan adanya manusia tidak

³ Adolf Heuken, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III dan IV* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1984), hlm. 151.

⁴ Edi S. Siregar, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 182.

⁵ Andy A Hakim, dkk, *Kamus Politik Pembangunan* (Yogyakarta: Kanisius, 1970), hlm. 88.

dapat memustahilkan politik. Pada prinsipnya, berpolitik berarti mengupayakan kesejahteraan bersama dan melayani masyarakat umum. Itu berarti, dalam setiap kekuasaan politis kebebasan pribadi mendapat tempat pertama, dan bukan permainan kuasa atau kepentingan.⁶

Selanjutnya dari sudut pandang biblis ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai dasar keterlibatan Gereja dalam bidang hidup politik. Apabila politik dipahami sebagai upaya bersama untuk menata kehidupan demi kesejahteraan banyak orang, maka nubuat Yeremia tentang kehendak Allah yang ‘bermuatan politis’ agar umat-Nya berjuang dan berdoa demi kesejahteraan kota dapat juga menjadi salah satu dasarnya. „*Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu (Yer. 29:7)*. Yeremia memang tidak menyajikan secara detail tentang keterlibatan umat Allah dalam berpolitik, namun konsep dasarnya amat jelas yaitu kesejahteraan kota. Allah memberikan peluang seluas-luasnya kepada bangsa Israel untuk merumuskan dan merealisasikan kesejahteraan kota dalam bentuk, sistem dan mekanisme tertentu. Dan semuanya harus diselaraskan dengan maksud penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah.⁷

Penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa pribadi manusia merupakan perwujudan dari Penciptanya yaitu Allah sendiri. Itu berarti bahwa manusia diciptakan sebagai rekan kerja atau mitra Allah di bumi dan diberi kuasa untuk mengelola alam ciptaan dalam kerja sama dengan Allah (Kej. 1:28). Pemberian kuasa oleh Allah untuk mengolah alam serta mengatur ciptaan lainnya, tidak ditafsirkan sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas atau mengatur ciptaan lain sesuka hati, namun semuanya harus dipandang dalam kesatuan sebagai komunitas ciptaan Tuhan. Manusia bukan disertai tugas untuk mengubah dan menghancurkan alam, tetapi diberi tugas untuk menemani dan mengatur makhluk ciptaan lain.⁸

Alam semesta adalah suatu komunitas, di mana setiap bagian akan menjadi sempurna apabila berada dalam hubungan timbal-balik dengan yang lain. Semuanya berhubungan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh sang Pencipta. Dalam hal ini, manusia sesungguhnya hanya diberi hak pakai oleh Allah, sedangkan pemilikinya tetap Allah. Pemberian kuasa ini tentu bernuansa politis, sebab kedaulatan Allah sebagai pemilik segala ciptaan tetap menjadi yang utama.⁹

Politik yang menjadikan kedaulatan Allah sebagai pegangan dalam mengatur kehidupan dunia ini sesungguhnya mengacu pada *teokrasi* atau pemerintahan Allah. Berkaitan dengan konsep *teokrasi*, pernyataan Allah kepada Musa di gunung Sinai dapat menjadi penegasannya. *Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: "Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel: Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu*

⁶ Harry Tjan Silalahi, “Panggilan Keterlibatan Umat Katolik di Bidang Sosial Politik“ dalam: *Kerasulan Politik. Panggilan dan Perutusan Umat Katolik* (Jakarta: Komisi Kerawam KWI, 2013), hlm. 131.

⁷ Stanislaus Surip, “Jejak Politis dan Dasar Biblis Berpolitik Etis“ dalam: *Kerasulan Politik. Panggilan dan Perutusan Umat Katolik* (Jakarta: Komisi Kerawam KWI, 2013), hlm. 4.

⁸ Bruno Maggioni, *Vangelo, chiesa e politica* (Milano: Ancora, 2011), hlm. 21.

⁹ Stanislaus Surip, *Op. Cit.*, hlm. 8.

akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel" (Kel. 19:3-6).

Pernyataan „**kerajaan imam dan bangsa yang kudus**“ (Kel. 19:6) merupakan pernyataan yang bermuatan politis. Di sana terungkap bahwa bentuk politiknya adalah kerajaan, pemimpinnya adalah imam dan ciri khasnya adalah kudus. Kerajaan ini amat berbeda dengan bentuk kerajaan duniawi sebab Allah adalah penguasa tunggal (bdk. Kel. 34:12-17) dan umat berada di bawah kedaulatan Allah. Inilah konsep *teokrasi* atau pemerintahan Allah¹⁰.

Dalam sejarah bangsa Israel, ternyata bentuk pemerintahan *teokrasi* dengan imam sebagai pemimpinnya tidak bertahan lama. Oleh karena perilaku moral tak terpuji yang dilakukan para imam dan keturunannya, sebagaimana ditunjukkan oleh Yoel dan Abia (dua anak Samuel) yang diangkat menjadi hakim di daerah Bersyeba, tetapi dalam hidupnya sibuk mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan (bdk. 1 Sam 8:2-3), maka para tua-tua Israel menuntut kehadiran seorang raja. Kehadiran raja baru dalam diri Saul yang diurapi oleh Samuel (1 Sam. 9-10) serta Daud, pengganti Saul (1 Sam. 15-16) memberikan makna baru pada pemerintahan *teokrasi*. Peran imam sebagai perantara dalam bentuk pemerintahan ini mulai merosot dan menjadi lebih parah ketika Daud menetapkan Salomo sebagai penggantinya (padahal seharusnya para imam yang memilih dan mengangkat seorang raja). Akibatnya sering kali para raja bertindak semena-mena karena tidak ada pihak lain yang mengontrol kepemimpinannya.¹¹

Pada periode para nabi, muncul sikap tegas dan kritis terhadap cara hidup manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nabi Natan, seorang pegawai istana dipakai Tuhan untuk memberi peringatan dan kecaman terhadap raja Daud berkaitan dengan praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh Daud terhadap rakyat yang berani mempersoalkan hak dan kedudukannya. Juga berkaitan dengan perbuatan Daud yang mengambil Batsyeba, isteri perwira Uria lalu berzinah dengannya dan kemudian memerintahkan agar segera membunuh Uria untuk menutup perkaranya (bdk. 2 Sam. 11:1-12:7). Nabi Elia meramalkan terjadinya kudeta berdarah yang menyingkirkan keluarga raja sebagai akibat dari pemaksaan raja Ahab terhadap Nabot, petani di kota Yizreel untuk melepaskan kebun anggurnya. Karena Nabot keras kepala, maka ia dibunuh oleh Izebel, puteri Kanaan, isterinya (1 Raj. 21:22-24; 19:16; 2 Raj. 9-10). Juga proses pengadilannya diatur sedemikian dan terkesan penuh dengan tipu muslihat.¹²

Nabi Amos, peternak dari Tekoa dipanggil Allah untukewartakan pesan Tuhan di Kerajaan Utara yang mengalami abad keemasan pada masa pemerintahan raja Yeroboam II. Akan tetapi, di balik kemegahan itu bangsa Israel sangat mengalami “sakit parah“: kesejahteraan hidupnya dihancurkan oleh kelompok elit, banyak orang ditindas, dipermiskin demi kemewahan lapisan atas. Menyaksikan ketimpangan tersebut, Amos tampil untukewartakan pembebasan bagi kaum miskin dan tertindas, penegakan hukum dan keadilan serta kemurnian kultus. Sedangkan nabi Mikha, salah seorang pemimpin rendah (semacam lurah) di kota Moresyat, pedalaman Yehuda

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11-12 dan Bruno Maggioni, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹² J.B. Banawiratma (ed.), *Gereja dan Masyarakat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 55-56.

mengeritik penyalahgunaan kekuasaan yang dijalankan oleh lapisan atas, penyelewengan dalam proses pengadilan dan pelaksanaan ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.¹³

Nabi Yesaya berkarya di wilayah Selatan pada masa yang hampir bersamaan dengan nabi Hosea di kerajaan Utara, lebih memperhatikan dimensi vertikal perjanjian yaitu hubungan umat Israel dengan Tuhan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa dalam kitab Hosea dan Yesaya tak ada sepatah kata pun yang berbicara tentang keadilan sosial. Kendatipun demikian, pernyataan-pernyataan mereka tetap berpengaruh dan bernilai kritis-profetis karena selalu menegaskan atau menggarisbawahi hal-hal yang telah disampaikan oleh nabi Amos dan Mikha, seperti persoalan penyelewengan terhadap hukum dan kekuasaan serta pelaksanaan ibadah secara munafik.

Selain itu, kedua nabi besar (Yeremia dan Yehezkiel) yang walaupun lebih menekankan dimensi vertikal, khususnya tentang pemujaan berhala dan pelanggaran terhadap inti perjanjian tetap juga memberikan kritik-kritik sosial. Yeremia mengeritik praktik pemerasan dalam bentuk praktik kerja paksa yang dilakukan raja Yoyakim (Yer 22:13-19). Yehezkiel yang hidup di tengah orang-orang buangan dari Yehuda di wilayah dekat ibukota Babel mewartakan tentang kesetiaan Yahwe terhadap Israel serta seruan tentang pemulihan terhadap pelaksanaan hukum dan kekuasaan.¹⁴

Lebih lanjut orang-orang Kristen awal di Roma mengalami hal yang lebih serius karena harus berhadapan dengan *politik teokrasi* serta orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sana ketaatan mereka dipertaruhkan: kepada Allah atau kepada kaisar? Paulus, rasul para bangsa mengapresiasi segi positif dari politik pemerintahan sehingga dalam batas-batas tertentu orang Kristen perlu tunduk atau taat pada pemerintah (bdk. Rm. 13:1-7). Paulus menegaskan bahwa pemerintahan berasal dari Allah dan karena itu menjadi hamba Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus hendak mengangkat kembali ide *teokrasi* untuk melawan gerakan pengkultusan dan penyembahan kepada kaisar.¹⁵

Konsep pemerintah sebagai hamba sebenarnya bertentangan dengan pandangan politik Romawi yang memandang kaisar sebagai penguasa tertinggi yang menuntut ketaatan atau loyalitas mutlak dari semua warganya. Atas dasar itu, maka pemerintah yang berasal dari Allah dan hamba Allah adalah pemerintah yang wajib menjalankan kehendak Allah; dalam arti harus mengedepankan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Terhadap pemerintah yang menjalankan pemerintahannya sesuai kehendak Allah seperti ini orang tidak perlu takut, bahkan harus menunjukkan ketaatannya termasuk dengan membayar pajak.¹⁶

Pandangan yang amat positif dari Paulus ini hendak menegaskan bahwa semua pemerintah berasal dari Allah (tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah). Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak taat kepada pemerintah dan setiap orang Kristen harus menyadari kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa Paulus mengingatkan orang Kristen untuk terlibat dalam politik agar pemerintahan yang datang dari Allah benar-benar terwujud.¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 59 dan Bruno Maggioni, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60-61.

¹⁵ Stanislaus Surip, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

Pandangan Paulus sejalan dengan apa yang diingatkan oleh Yesus, sang Guru sejati ketika berhadapan dengan murid-murid orang Farisi dan orang Herodian yang bertanya tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saat ditanya apakah boleh membayar pajak kepada kaisar (negara), Yesus menegaskan bahwa kewajiban masyarakat kepada negara dan kepada Allah harus dijalankan secara proporsional: „berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Mat. 22:21). Gereja juga harus menyadari bahwa kewajiban kepada Allah dan kepada negara bukanlah suatu dualisme yang harus dipertentangkan, tetapi keduanya harus dijalankan secara baik dan benar.¹⁸

1.2. Bentuk Khas Keterlibatan Gereja dalam Politik

Bagi orang beriman Kristiani, peran dan keterlibatan aktif dalam politik, entah politik akademis dan politik praktis¹⁹ - politik kekuasaan dan politik kemanusiaan²⁰ merupakan bagian dari tuntutan tugas panggilan dan perutusan sebagai murid-murid Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen wajib mengambil bagian dalam bidang ini, sambil tetap memperhatikan pembatasan yang sesuai dengan aturannya.

Gereja perlu menyadari bahwa sebenarnya tugas untuk terlibat langsung dalam bidang politik adalah tugas kaum awam (bukan kaum klerus atau hirarkhi). Hal ini tidak berarti bahwa Gereja dalam arti struktural (kaum klerus) berdiam diri, menonton dari jauh atau menjadi pribadi yang apolitis. Keterlibatan kaum klerus dalam politik adalah sesuatu yang mutlak. Klerus bukanlah kelompok yang apolitis, tetapi yang memiliki hak berpolitik. Kaum klerus bukan pribadi-pribadi yang buta politik, tetapi insan yang terbuka terhadap segala kenyataan politik dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, klerus tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohani yang melayang di awang-awang, tetapi juga sebagai pemimpin duniawi yang berpijak di bumi untuk menghantar umatnya kepada ketenteraman dan kesejahteraan dalam hidup. Gereja dalam arti struktural (kaum klerus) harus terlibat dalam politik kemanusiaan atau politik kepedulian sosial; sedangkan dalam politik praktis, klerus

¹⁸ Antonius S. Bunyamin, “Keterlibatan Politik: Wujud Tanggungjawab Kristiani“ dalam: *KOMUNIKASI* – Majalah Keuskupan Bandung No. 451, Mei 2018, hlm. 15.

¹⁹ Menurut Selo Soemardjan, pembedaan antara politik akademis dan politik praktis merupakan upaya untuk membantu warga masyarakat dalam memahami konsep politik secara tepat. Politik akademis sangat membantu seseorang untuk mengerti maksud, tidak buta politik dan tidak naif. Politik akademis adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan (politik) dalam lingkungan masyarakat ilmiah seperti pada perguruan tinggi. Sedangkan politik praktis adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang sebagai warga negara yang dengan sadar dan sengaja menggunakan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Uraian lengkap tentang politik akademis dan politik praktis dapat dibaca dalam artikel Selo Soemardjan berjudul: “Politik Akademis Dan Politik Praktis“, dalam: *KOMPAS* 14 April 1998, hlm. 4-5. Bdk. Amatus Woi, “Komunitas Umat Basis dan Keterlibatannya dalam Bidang Sosial-Politik” (makalah seminar di Hokeng, 14 September 2001).

²⁰ Menurut Y. B. Mangunwijaya, politik kekuasaan adalah salah satu bentuk politik yang dapat disamakan dengan permainan kotor, najis dan tidak bermoral bahkan jahat. Politik ini bertujuan untuk kesejahteraan pribadi atau golongan tertentu dan kerap kali digunakan dengan cara yang tidak halal. Sedangkan politik kemanusiaan adalah politik dalam arti luas yang memperjuangkan kesejahteraan banyak orang. Yang menjadi prioritas utama dalam perjuangan politik kemanusiaan ini adalah kepentingan umum. Oleh karena itu, politik kemanusiaan disamakan dengan politik moral. Bdk. Y. B. Mangunwijaya, *Politik Hati Nurani* (Jakarta: Grafiarsi Mukti, 1997), hlm. 90.

boleh terlibat, kecuali bila ada izin atau restu dari otoritas Gerejani yang berwenang (bdk. Kanon 285; 287; 90; 85).²¹

Dalam konteks biblis, beberapa hal yang dapat diangkat sebagai bentuk keterlibatan konkret yang dapat diperankan oleh orang Kristen, antara lain:

➤ Menjadi garam dan terang dunia

Yesus Kristus mengajarkan para pengikut-Nya untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 15:13-16). Garam digunakan oleh orang Yahudi sebagai kiasan, misalnya berkaitan dengan perjanjian garam artinya perjanjian kekal (bdk. Bil. 18:19; 2 Taw. 13:5). Kata-kata Yesus dalam injil Matius juga harus dipandang sebagai kiasan, sebab manusia bukan garam. Kiasan ini mengacu pada para pengikut Kristus yang sudah mengikat perjanjian kekal dengan Allah dan diri-Nya, sehingga mereka tidak bisa terpisah dari Allah ibarat garam yang harus tetap asin.²²

Sebagaimana garam harus tetap asin agar dapat menjadi penyedap rasa dan pengawet yang mencegah kebusukan; Gereja dipanggil untuk mengawetkan dunia melalui pelestarian hal-hal positif yang sudah ada, mencegah pembusukan dalam berbagai aspek kehidupan sekaligus menjadi “penyedap rasa“ bagi dunia. Gereja harus tampil seperti garam yang menjadi penyedap rasa dengan perannya dalam menciptakan suasana hidup yang baik dan bermutu, kapan dan di manapun berada sekaligus membasmi segala bentuk kecenderungan jahat, antara lain: egoisme, materialisme, radikalisme, perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sebagainya.²³ Singkatnya, Gereja tidak boleh kehilangan peran dalam tata dunia, tetapi sebaliknya tampil dengan kekhasannya untuk menjaga keutuhan wajah dunia.

Gereja juga harus tampil sebagai terang yang menunjukkan jalan bagi semua orang menuju Allah. Peran sebagai terang ini selaras dengan Hamba Yahwe yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa (Yes. 42:6; 49:6). Panggilan menjadi terang ini berkaitan dengan kiasan tentang kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi (Mat. 5:14) dan tentang pelita yang ditempatkan di atas kaki dian (Luk. 11:33).

Kombinasi terang, dunia, kota dan gunung sesungguhnya merujuk pada nubuat eskatologis dalam Yesaya 2:2-5. Gunung Sion dengan kota Yerusalem dan Bait Allahnya akan menarik bangsa-bangsa lain untuk belajar hukum Allah dan mendorong Israel untuk berjalan dalam terang Tuhan. Peran gunung Sion yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain menjadi kiasan yang harus diwujudkan oleh Gereja.

Kiasan ini menggambarkan bahwa Gereja memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa di dunia sekaligus harus tampil ibarat pelita yang menerangi seluruh rumah. Artinya, Gereja menerangi dunia dengan menunjukkan kebaikan dan kebenaran sekaligus memberikan inspirasi bagi dunia agar dunia menjadi lebih baik dan layak dihuni. Gereja tidak boleh menyembunyikan karunia yang telah diperolehnya dari Tuhan, tetapi menggunakannya untuk menerangi dunia.

²¹ Yohanes Don Bosco Bhodo, *Imam dan Politik. Membuka dan Menelaah Wacana Keterlibatan Politis Imam* (Ende: Nusa Indah, 2007), hlm. 112-115.

²² Stanislaus Surip, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

Semuanya ini hanya mungkin terjadi bila Gereja (pengikut Kristus) tetap bersatu dengan Kristus dan berakar dalam Kristus.²⁴

- Menjadi agen perubahan yang tetap berpegang pada kebenaran

Gereja pada umumnya dan secara khusus para politisi Kristen dituntut untuk tampil sebagai agen perubahan dalam seluruh bidang kehidupan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika selalu berpegang pada kebenaran; berbicara apa adanya, berkata benar dan bertindak jujur. Berani mengatakan apa yang sesungguhnya: *jika ya, katakanlah ya dan jika tidak, harus juga berani mengatakan tidak* – bukan samar-samar atau kira-kira (bdk. Mat. 5:33-37). Gereja (pengikut Kristus) tidak boleh bersumpah palsu, tetapi selalu ingat bahwa kebohongan, penipuan dan pengingkaran atas janji atau sumpah merupakan kejahatan dan dosa.²⁵

Dengan menjadi agen perubahan yang setia pada kebenaran, maka „jiwa politik“ yang nampak dalam nilai-nilai kebangsaan serta kearifan dapat ditampilkan dan dihayati dalam kehidupan. Jiwa politik bukan hanya sekedar urusan visi, misi, program kerja saja, tetapi harus dirajut dalam kebersamaan dengan nilai-nilai penting sehingga semuanya terarah kepada kesejahteraan bersama.²⁶

- Menjadi pelopor yang tahu haknya serta siap melakukan kewajibannya

Gereja dipanggil untuk menyatakan kehendak Allah dan memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Dalam konteks ini, nampak bahwa para pengikut Kristus (Gereja) memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat dari pada orang lain. Sebab dalam perkara politik dan urusan pemerintahan, Gereja tidak hanya berperan untuk urusan kesejahteraan bersama, tetapi juga memuliakan Allah (melakukan semua demi kemuliaan Allah).

Mengurus negara dan kesejahteraan banyak orang tidak dapat dipisahkan dari bakti (takut) pada Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, jelas bagi Gereja, tidak ada pemisahan antara urusan manusiawi dan Ilahi, sebaliknya kepedulian pada urusan manusiawi merupakan wujud kesetiaan pada tugas perutusan Gereja, dan hormat bakti pada yang Ilahi juga terwujud melalui kepedulian pada perkara manusiawi ... sebab tidak ada pewartaan Injil jika perjuangan mewujudkan keadilan dan kebenaran diabaikan oleh Gereja (bdk. Nota Pastoral KWI 2018, No. 18).

Sejalan dengan pandangan di atas, Gereja harus menyadari bahwa kewajiban kepada Allah dan kepada negara bukanlah suatu dualisme yang harus dipertentangkan, tetapi keduanya harus dijalankan secara baik dan benar²⁷. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus mengingatkan jemaatnya untuk mendukung pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik (Tit. 3:1). Atau Rasul Petrus dalam suratnya menegaskan kembali pentingnya takut akan Allah, kasih kepada sesama dan hormat kepada pemerintah sebagai keutamaan yang harus dilaksanakan oleh semua (bdk. 1 Ptr. 2:17).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁶ Serafin Dany Sanusi, “Saatnya Ikut Menentukan“ dalam: *KOMUNIKASI – Majalah Keuskupan Bandung* No. 451, Mei 2018, hlm. 4.

²⁷ Antonius S. Bunyamin, *Loc. Cit.*

2. Keterlibatan Gereja di Tahun Politik: Wujud Tanggungjawab Kristiani

March dan Olsen sebagaimana dikutip oleh Lucius Karus, peneliti senior FORMAPPI menyatakan bahwa keberhasilan suatu negara bukan hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya saja, tetapi dapat dilihat dari *design* pembangunan kelembagaan politik. Pembangunan kelembagaan politik dibangun melalui mekanisme yang dinamakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki posisi-posisi di lembaga pemerintahan negara, khususnya kepala eksekutif dan anggota legislatif.²⁸

Gereja Indonesia kini berhadapan dengan kenyataan tahun politik. Tentu tak dapat dihindari ketika orang bertanya tentang posisi atau sikap Gereja. Mgr. Albertus Soegijapranoto berpesan kepada politisi Katolik: „ *...jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu, tanpa kamu terlibat di dalamnya ...*“ Oleh karena itu, beberapa hal konkret yang harus dilakukan oleh Gereja di tahun politik ini, antara lain:

✓ Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

Politik bukanlah hal yang tabu bagi Gereja, bukan pula merupakan sesuatu yang kotor atau najis. Gereja harus terlibat. Para Gembala (Uskup) sering mengingatkan tentang pentingnya partisipasi umat Katolik sebagai warga negara untuk menentukan pemimpinnya di daerah masing-masing. Mengambil bagian dalam pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif serta para kepala daerah merupakan hak sekaligus panggilan sebagai warga negara dan warga Gereja. Orang Katolik harus aktif membangun bangsa dan negara tercinta: 100% Katolik, 100% Indonesia.²⁹

Setiap anggota Gereja harus menyadari bahwa dengan ikut memilih berarti Gereja menyadari dan menghayati sebagai bagian dari masyarakat (warga negara) Indonesia yang terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kehadiran Gereja menjadi perjumpaan yang meneguhkan dan penuh sukacita sebab satu suara ikut menentukan perubahan bangsa.

✓ Menjadi pemilih yang beriman dan cerdas

Keterlibatan Gereja dalam pemilihan umum harus juga nyata ketika setiap orang yang memiliki hak suara dalam ajang politik 5 tahunan menggunakan hak pilihnya secara baik dan bertanggungjawab. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi sebagai pemilih yang beriman dan cerdas. Pemilih yang beriman berarti pemilih yang sadar bahwa apapun keputusannya saat menggunakan hak memilih dalam pemilu, akan selalu berkaitan dengan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Sedangkan pemilih yang cerdas berarti pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup sebelum memutuskan serta menggunakan hak pilihnya.³⁰

Adapun beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya, adalah:

²⁸ Uraian lengkap dan mendalam tentang hal ini dapat dibaca dalam Lucius Karus, “Tips Memilih dalam Pemilu Serentak 2019” (makalah seminar di Ende, 12 Desember 2018), hlm. 3.

²⁹ Serafin D. Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

- a. Memastikan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih, mencermati ideologi dan program partai politik pendukung para calon atau pasangan calon.
- b. Mengetahui rekam jejak (moral, sosial-kemasyarakatan, organisasi dan aspek-aspek lainnya) serta tawaran program para calon atau pasangan calon melalui berbagai media informasi yang tersedia.
- c. Menggunakan informasi seputar pemilu dalam berbagai media sosial dengan cermat dan bijaksana. Artinya, menghindari segala bentuk ujaran kebencian, hoax dan politik adu domba.
- d. Memutuskan untuk memilih para calon atau pasangan calon dengan penuh sukacita. Perlu menyadari bahwa golput bukanlah sebuah pilihan. Itu berarti, memilih bukan karena terdorong oleh iming-iming atau janji dari para calon/pasangan calon, tetapi memilih dengan hati nurani yang bening.
- e. Berani mengatakan tidak pada setiap bentuk politik uang dan politik transaksional. Sebab politik uang sesungguhnya menjadi cikal bakal korupsi. Ketika seseorang memaklumi bahkan menerima politik uang, maka sebenarnya sedang menanam serta menyuburkan praktik korupsi.

Penutup

Keterlibatan Gereja dalam politik sesungguhnya merupakan suatu keharusan. Dasar keterlibatan Gereja amat jelas yaitu terletak pada panggilan untuk turut membangun moral politik. Moral politik yang dimaksudkan di sini adalah politik yang ditujukan untuk keadilan, perdamaian, kesejahteraan bersama serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berpolitik berarti melayani masyarakat bukan dengan kuasa, melainkan dengan hati, kejujuran dan tanpa pamrih (bdk. Luk. 9:33-37).

Berpolitik yang benar bagi seorang Katolik adalah berpolitik yang sesuai dengan visi politik Yesus, yaitu untuk menggapai dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang sekaligus memuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa (bdk. Yoh. 17:1-26). Selain itu, tetap sejalan dengan misi politik Yesus yakni membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan belenggu, baik jiwa maupun raga (bdk. Luk. 4:18-19).

Daftar Kepustakaan

Dokumen Gereja dan Buku:

Alkitab Deuterokanonika. 1974. Jakarta: LAI-LBI.

Banawiratma, J. B. (ed.). 1986. *Gereja Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.

Bhodo, Yohanes Don Bosco. 2007. *Imam dan Politik. Membuka dan Menelaah Wacana Keterlibatan Politis Imam*. Ende: Nusa Indah.

Hadiwikarta, J. (ed.). 1991. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: OBOR.

Hakim, A.A. dkk. 1970. *Kamus Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Heuken, Adolf. 1984. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III, IV*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Kolbenschlag, M. (ed.). 1985. *Between God and Caesar: Priest, Sister and Political Office in the United States*. New York: St. Paulist Press.
- Komisi Kerawam KWI. 2013. *Kerasulan Politik - Panggilan dan Perutusan Umat Katolik*. Jakarta: Kerawam KWI.
- Maggioni, Bruno. 2011. *Vangelo, chiesa e politica*. Milano: Ancora.
- Mangunwijaya, Y.B. 1997. *Politik Hati Nurani*. Jakarta: Grafiarsi Mukti.
- Purwanto, Edy. 2013. *Kaum Awam dan Dasar-Dasar Panggulan Untuk Merasul (Seri Pembelajaran Politik Umat)*, Komisi Kerasulan Awam KWI.
- Rodee, Carlton Clymer. 1993. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siregar, Edi S. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.

Artikel dan Makalah Seminar:

- Bunjamin, Antonius S. “Keterlibatan Politik: Wujud Tanggungjawab Kristiani”, dalam: *KOMUNIKASI* No. 451, Mei 2018.
- Karus, Lucius. “Tips Memilih dalam Pemilu Serentak 2019” (makalah seminar di Ende, 12 Desember 2018).
- Nota Pastoral KWI 2018. “Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa, Menjadi Gereja Yang Relevan dan Signifikan”.
- Sanusi, Serafin Dany. “Saatnya Ikut Menentukan”, dalam: *KOMUNIKASI* No. 451, Mei 2018.
- Soemardjan, Selo. “Politik Akademis Dan Politik Praktis“, dalam: *KOMPAS* 14 April 1998.
- Woi, Amatus. “Komunitas Umat Basis dan Keterlibatannya dalam Bidang Sosial-Politik” (makalah seminar di Hokeng, 14 September 2001).